

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT  
*FISCAL INDEPENDENCE* SEJAK ERA OTONOMI DAERAH  
(STUDY KASUS: PROVINSI LAMPUNG)**

**(Skripsi)**

**Oleh :**

**Nova Novianti**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2019**

## **ABSTRACT**

### **FACTORS THAT INFLUENCE FISCAL INDEPENDENCE LEVELS SINCE THE ERA OF REGIONAL AUTONOMY (STUDY OF THE LAMPUNG PROVINCE)**

**By**

**Nova Novianti**

Fiscal progress in the province of Lampung since the era of regional autonomy (2001-2015) has continued to improve and influence the factors that affect investment, the rate of economic growth and energy on fiscal independence in the province of Lampung. This study uses descriptive analysis and uses multiple regression models with the Error Correction Model (ECM) method. Fiscal independence in the province of Lampung since the era of regional autonomy (2001-2015) continued to fluctuate with an average value of 12.4% related to the financial independence of the Lampung province in the less category. The estimation results show the amount of investment and economic growth rate is positive and significant for fiscal independence in Lampung province, while labor is not significant for fiscal independence in Lampung province.

Keywords: Fiscal independence, investment, the rate of economic growth and labor.

## ABSTRAK

### FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT *FISCAL INDEPENDENCE* SEJAK ERA OTONOMI DAERAH (STUDI KAUSUS PROVINSI LAMPUNG)

Oleh

**Nova Novianti**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah tingkat *fiscal independence* di provinsi Lampung sejak era otonomi daerah (2001-2015) terus mengalami peningkatan serta bagaimana pengaruh faktor-faktor yang dianggap mempengaruhi yaitu investasi, laju pertumbuhan ekonomi dan tenaga terhadap *fiscal independence* di provinsi Lampung. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan menggunakan model regresi berganda dengan metode *Error Correction Model* (ECM). Berdasarkan hasil perolehan disimpulkan bahwa tingkat *fiscal independence* di provinsi Lampung sejak era otonomi daerah (2001-2015) terus berfluktuasi dengan perolehan nilai rata-rata 12,4% yang berarti bahwa kemandirian keuangan daerah provinsi Lampung tergolong dalam kategori kurang. Hasil estimasi menunjukkan bahwa jumlah investasi dan laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap *fiscal independence* di provinsi Lampung, sedangkan tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap *fiscal independence* di Provinsi Lampung.

Kata Kunci: *fiscal independence*, kemandirian fiskal, investasi, laju pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja.

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT  
*FISCAL INDEPENDENCE* SEJAK ERA OTONOMI DAERAH  
(STUDY KASUS: PROVINSI LAMPUNG)**

**Oleh :  
Nova Novianti**

**SKRIPSI  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA EKONOMI**

**Pada  
Jurusan Ekonomi Pembangunan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2019**

Judul Skripsi

: **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
TINGKAT FISCAL INDEPENDENCE SEJAK  
ERA OTONOMI DAERAH (STUDI KASUS:  
PROVINSI LAMPUNG)**

Nama Mahasiswa

: Nova Novianti

No. Pokok Mahasiswa

: 1311021066

Jurusan


: Ekonomi Pembangunan

Fakultas

: Ekonomi dan Bisnis

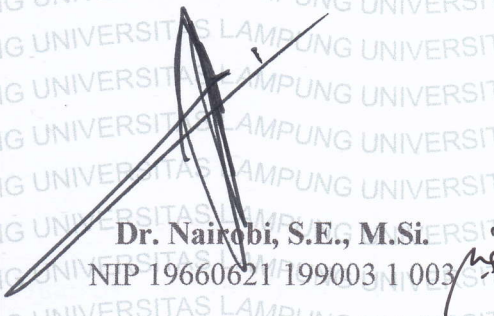
**MENYETUJUI**

1. **Komisi Pembimbing**

  
**Dr. Marselina, S.E., M.P.M.**

NIP-19670710 199003 2 001

2. **Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan**

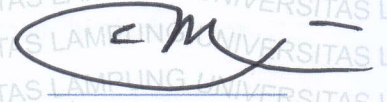
  
**Dr. Nairobi, S.E., M.Si.**

NIP 19660621 199003 1 003

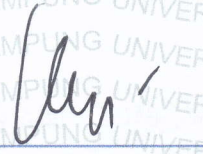
**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

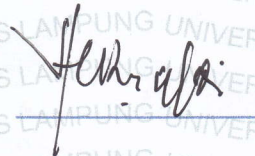
Ketua : **Dr. Marselina, S.E., M.P.M.**



Penguji I : **Moneyzar Usman, S.E., M.Si.**



Penguji II : **Dr. Heru Wahyudi, S.E., M.Si.**



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

**Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si.**

NIP. 19610904198703 1 011



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **13 Maret 2019**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan bukan merupakan hasil penjiplakan hasil karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Bandar Lampung, 01 Maret 2019



Nova Novianti

## RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Nova Novianti lahir pada tanggal 16 November 1995 di Pajar Bulan, Lampung Barat. Penulis lahir sebagai anak pertama dari pasangan Bapak Misardi dan Ibu Nur Asiah.

Penulis mulai menjalani pendidikan di TK Islam Al-iryad Darussalam pada tahun 2000 dan selesai pada tahun 2001. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SDN 02 Pajar Bulan dan selesai pada tahun 2007. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 1 Way Tenong dan tamat pada tahun 2010. Pada tahun yang sama penulis meneruskan pendidikannya di SMA Negeri 1 Way Tenong dan tamat pada tahun 2013.

Pada tahun 2013 penulis diterima di perguruan tinggi Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri) pada Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomidan Bisnis. Pada semester lima, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di DesaKibang Pacing, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang.



## **MOTTO**

“Do your best, and you will get the better.”

”Kita tidak tahu bagaimana hari esok, yang bisa kita lakukan adalah berbuat  
sebaik-baiknya dan berbahagia hari ini.”

(Samuel Taylor Coleridge)

## **PERSEMBAHAN**

Karya ini kupersembahkan kepada :

Kedua orang tuaku yang sangat kusayangi, Bapak Misardi dan Ibu Nur Asiah yang selalu menyayangiku, menghiburku, mendengarkan keluh kesahku, dan selalu menyemangatiku. Terima kasih untuk semua pengorbanan dan perjuangan, dan kesabaran dalam menanti keberhasilanku.

Adikku Pani Padilah yang selalu memberikan canda tawa serta semangat yang tiada henti.

Para Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah berjasa memberikan bimbingan dan ilmu yang sangat berharga. Terima kasih atau ketulusan dan kesabarannya selama membimbing penulis.

Almamaterku tercinta, Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung

## SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT. Atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat *Fiscal Independence* sejak Era Otonomi Daerah (Studi Kasus: Provinsi Lampung)" sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.

Dalam proses penyelesaian skripsi, penulis mendapat bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H.Satria Bangsawan, S.E, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Emi Maimunah, S.E., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Bapak M. Husaini, S.E., M. Si. selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktu untuk memberikan saran dan dukungan dalam proses kuliah.

5. Ibu Dr. Marelina, S.E., M.P.M. selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dengan penuh kesabaran, memberikan saran dan dukungan dalam proses kuliah dan penyusunan skripsi kepada penulis.
6. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si. dan bapak Prayudha Ananta, S.E., M.Si, terima kasih atas kesediaannya dalam memberikan pengarahan dan pengetahuan dalam proses penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas kritik dan saran yang telah disampaikan pada seminar prososal.
7. Bapak Monezar Usman, S.E., M.Si. selaku dosen penguji I pada ujian komprehensif, terimakasih atas kesediaannya dalam memberikan pengarahan dan pengetahuan dalam proses penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas kritik dan saran yang telah disampaikan pada seminar hasil.
8. Bapak Dr. Heru Wahyudi, S.E., M.Si, selaku dosen penguji II pada ujian komprehensif, terima kasih atas kesediaannya dalam memberikan pengarahan dan pengetahuan dalam proses penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas kritik dan saran yang telah disampaikan pada seminar hasil.
9. Seluruh Bapak Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama proses perkuliahan hingga selesai dan
10. Ayah dan Mamahku tercinta, Bapak Misardi dan Ibu Nur Asiah atas semua kasih sayang, kesabaran dan pengorbanan tiada henti memberikan semangat untukku.
11. Sahabat-sahabat tersayang, yang selalu menemani hari-hari penulis selama proses perkuliahan, memberikan dukungan dan mendengarkan curahan hati penulis setiap saat serta membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Teman-teman Ekonomi Pembangunan 2013,. Terima kasih atas bantuan dan dukungan selama proses perkuliahan sampai selesai, serta kebersamaan dalam canda dan tawa.

13. Staf FEB dan EP yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.

14. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak disebutkan satu-persatu

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan pengorbanan bapak, ibu, kakak, adik, dan teman-teman. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan akan tetapi penulis berharap semoga karya ini berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Bandar Lampung, 01 Maret 2019

Penulis

**Nova Novianti**

## DAFTAR ISI

### Halaman

<b>DAFTAR ISI</b>	
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	
<b>DAFTAR TABEL</b>	
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	15
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Manfaat Penelitian.....	17
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>18</b>
A. Landasan Teori .....	18
B. Penelitian terdahulu.....	37
C. Kerangka Pemikiran .....	39
D. Hipotesis.....	42
<b>III. METODE PENELITIAN</b> .....	<b>43</b>
A. Jenis Penelitian dan Sumber Data .....	43
B. Definisi dan Operasionalisasi Variabel .....	44
C. Model Penelitian.....	45
D. Metode Analisis Data .....	46
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>55</b>
A. Hasil Analisis Deskriptif .....	55
B. Hasil Pengolahan Data .....	56
1. Hasil Uji Stasioner .....	56
2. Hasil Uji Kointegrasi .....	58
3. Hasil Estimasi <i>Error Correction Model</i> (ECM) .....	59
4. Hasil Pengujian Keberartian Setiap Variabel (Uji-t) .....	62
5. Hasil Pengujian Keberartian Menyeluruh (Uji-F) .....	63
C. Pembahasan .....	64
a. Pengaruh Investasi Terhadap <i>Fiscal Independence</i> di Provinsi Lampung .....	64
b. Pengaruh Laju PE Terhadap <i>Fiscal Independence</i> di Provinsi Lampung .....	65
c. Pengaruh TK Terhadap <i>Fiscal Independence</i> di Provinsi Lampung .....	66
<b>V. SIMPULAN DAN SARAN</b> .....	<b>68</b>
A. Simpulan .....	68

B. Saran ..... 69

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
1. Peningkatan Dana Transfer dari Pusat ke Daerah(1995 – 2015) .....	7
2. Pertumbuhan Investasi di Provinsi Lampung tahun 2001-2015 .....	12
3. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung tahun 2001-2015.....	13
4. Pertumbuhan Jumlah Tenaga Kerja Provinsi Lampung 2001-2015.....	15
5. Model Kerangka Pemikiran.....	42



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Proporsi Dana Perimbangan Terhadap APBD Provinsi Lampung Tahun 2001-2015 (Juta Rupiah).....	8
2. Penelitian Terdahulu .....	37
3. Proporsi BHPBP Terhadap Total Penerimaan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2001-2015 .....	55
4. Hasil Uji Stasioner ( <i>Unit Root Test</i> ) Pada Tingkat Level .....	57
5. Hasil Uji Stasioner ( <i>Unit Root Test</i> ) Pada Tingkat <i>First Difference</i> .....	57
6. Hasil Uji Stasioner ( <i>Unit Root Test</i> ) Pada Tingkat <i>Second Difference</i> .....	58
7. Hasil Uji Kointegrasi Engel-Granger (EG).....	59
8. Hasil Estimasi Jangka Pendek <i>Error Correction Model</i> (ECM) .....	60
9. Hasil Uji-t.....	63
10. Hasil Uji-F.....	64

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Data <i>fiscal independence</i> (rasio PAD/TPD), Investasi, Laju PE, dan Tenaga Kerja Provinsi Lampung Tahun 2001-2015 yang di Interpolasi dari Data Tahunan Menjadi Data Kuartalan.....	L-1
2. Hasil Uji Stasioner Data ( <i>Unit Root Test</i> ) Pada Tingkat Level.....	L-2
3. Hasil Uji Stasioner Data ( <i>Unit Root Test</i> ) Pada Tingkat <i>First Difference</i> .....	L-4
4. Hasil Uji Stasioner Data ( <i>Unit Root Test</i> ) Pada Tingkat <i>Second Difference</i> .....	L-5
5. Hasil Uji Kointegrasi Engel Granger(EG).....	L-7
6. Hasil Estimasi <i>Error Correction Model</i> (ECM).....	L-8

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, A. 2012. *"Filosofi Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal"*. DTSD Pusdiklat KNPB-BPPK.
- Adhidarma, G., dan Purbasari, D. 2012. *"Hubungan antara Investasi dengan GDP"*. Macroeconomic Dashboard: Universitas Gajah Mada.
- Asmuruf, M., Rumat, V., dan Kawung, G., 2015. *"Pengaruh Pendapatan dan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Sorong"*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol. 15 No. 05.
- Ahmad, I. 2011. *"Regional Fiscal Independence in East Java Province Post Regional Autonomy"*. Economic Journal of Emerging Markets. Vol. 3(2) 189-198.
- Anwar, E. 2013. *"Analisis Kemandirian Fiskal Tahun 2010-2012 daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara"*. Jurnal Berkala Efisiensi, Universitas Sam Ratulangi.
- Astuti, Titi Yuli., dan Sunarto. 2015. *"Pengaruh PAD dan DAU terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2008-2013."* Accounting journal, Vol.3 No.1 Juni 2015.
- Aziz, A., dan Wulandari, R. 2013. *"Analisis Pengaruh Equalization Grant, Sumber Kemandirian Fiskal, Sumber Pembiayaan Defisit, dan Faktor Penyerap Fasilitas Publik terhadap Belanja Modal Daerah"*. Jurnal Akuntansi ABFI Institute PERBANAS.
- Badrudin, Rudi. 2011. *"Ekonomika Otonomi Daerah"*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Badan Pusat Statistik, 2001 – 2015. *"Lampung Dalam Angka"*. Provinsi Lampung.
- Boediono. 1999. *"Mengenal Beberapa Metode Kuantitatif dalam Ilmu Ekonomi"*. BPFE.

- Boetti, L., Piacenza, M., dan Turati, G. 2010. “*Decentralization Government’s Performance: How Does Fiscal Autonomy Affect Spending Efficiency*”. Departemen of Economics and Public Finance “G. Prato” Working Paper Series.
- Departemen Keuangan RI, 2015. “*Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*”. Jakarta.
- Eka, A. 2011. “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang”. [Skripsi] Semarang: Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. 2003. “*Essentials of Econometric*”. McGraw Hill International Editions.
- Jhomsom, P., dan Philips, D. 2012. “*Scottish Independence: the Fiscal Context*”. Institute for Fiscal Studies. Briefing Note BN135.
- Kristiano, N. 2015. “*Otonomi Daerah*”. Universitas Negeri Semarang.
- Kopits, G. 2016. “*The Case for an Independent Fiscal Institution in Japan*”. IMF Working Paper Vol. 16 No. 156.
- Kumorotomo, W. 2008. “*Desentralisasi Fiskal: Politik dan Perubahan Kebijakan 1974-2004*”. Prenada Media.
- Kuncoro, M. 2004. “*Otonomi & Pembangunan Daerah*”. Universitas Gajah Mada.
- Ladjin, Nujanna. 2008. “Analisis Kemandirian Fiskal di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Provinsi Sulawesi Tengah)”. [Tesis] Semarang: Universitas Diponegoro.
- Mardiasmo. 1999. “*Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berorientasi Pada Kepentingan Publik*”. PAU Studi Ekonomi UGM.
- Maryeta, Ruth Karlina., dan Hutasoit. 2017. “*Pengaruh PAD,DBH, DAU dan DAK Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat*”. International Repository (USU-IR).
- Merizka, Reza. 2013. “*Pengaruh PAD,DBH, DAU dan DAK Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat (Tahun 2006-2011)*”. Artikel Ilmiah, UNP.
- Mita, A. 2012. “Pengaruh Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah”. [Skripsi] Tasikmalaya: Universitas Siliwangi

- Ratnik, A. 2015. “*Fiscal Independence of the Health Insurance System*”. Ministry of Finance of the Republic of Estonia.
- Sukirno, S. 2000. “*Makroekonomi Modern – Perkembangan Pemikiran dari Klasik Hingga Keynesian Baru*”. PT. Raja Grafindo Persada.
- Suprajitno, Pudji. 2003. “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Fiskal Daerah (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara)”. [Tesis] Semarang: Universitas Diponegoro.
- Taryoko. 2016. “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah di DIY periode 2006-2015.” [Skripsi] Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Thesaurianto, Kuncoro. 2007. “Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kemandirian Daerah”. [Tesis] Semarang: Universitas Diponegoro.
- Walalangi, Stasya., Dkk. 2017. “*The Influence of Local Revenue to Employment in Manado.*” Jurnal Berkala Ilmian Efisiensi. Vol. 17 no. 01.
- William, V. 1966. “*New Light on Size Question*”. Journal cit – Reseach Bulletin, Vol. 6(2).
- Yusdianto. 2015. “*Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah Menurut UU no. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*”. Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 3.

URL :

<http://respository.usu.ac.id/handle/123456789/68049>

<https://doi.org/10.24964/ja.v3i1.41>

<https://lampung.bps.go.id>

[www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Seiring dengan perubahan kepemimpinan nasional dari era orde baru menuju era reformasi, pola pemerintahan juga berubah dari sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik menjadi desentralisasi. Perubahan sistem pemerintahan ini dimulai sejak tahun 2001 yang dikenal dengan era otonomi daerah. Alasan-alasan yang menyebabkan lahirnya tuntutan reformasi adalah, *pertama*, intervensi pemerintah pusat yang terlalu besar di masa yang lalu telah menimbulkan masalah rendahnya kapabilitas dan efektifitas pemerintah daerah dalam mendorong proses pembangunan dan kehidupan demokrasi di daerah. Hal tersebut menyebabkan inisiatif dan prakarsa daerah cenderung mati sehingga pemerintah daerah seringkali menjadikan pemenuhan peraturan sebagai tujuan, dan bukan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. *Kedua*, otonomi daerah merupakan jawaban untuk memasuki *era new game* yang membawa *new rules* pada semua aspek kehidupan manusia di masa yang akan datang (Ladjin, 2008).

Otonomi daerah menurut Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan

peraturan perundang-undangan, atau dengan kata lain mengubah bentuk pemerintahan dengan struktur tersentralisasi menjadi struktur yang terdesentralisasi. Pelaksanaan otonomi daerah pada kabupaten dan kota ditandai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah yang bersangkutan yang sesuai dengan prinsip desentralisasi. Desentralisasi menurut Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut dipertegas lagi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 yang diperbarui menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 bahwa Pemerintah Daerah yang menjadi daerah otonom memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumberdaya yang dimiliki untuk pos-pos belanja daerah dengan menganut asas kepatuhan, kebutuhan, dan kemampuan daerah yang tertuang dalam anggaran daerah.

Dalam implementasi otonomi daerah, kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada publik melalui instrumen kebijakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menjadi dasar pengelolaan keuangan daerah. Peningkatan pelayanan publik ini diharapkan mampu menarik kesempatan investasi suatu daerah. Salah satu cara untuk mendukung peningkatan investasi suatu daerah adalah dengan lebih meningkatkan belanja modal daerahnya. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah harus mampu mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat agar daerah menjadi lebih mandiri yang salah satunya

diindikasikan dengan meningkatnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber penerimaan daerah. PAD merupakan indikator penting untuk mengukur tingkat kemandirian daerah melalui penerimaan sektor pajak, retribusi, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Peningkatan PAD dalam jumlah yang besar diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah, mengurangi atau bahkan menghilangkan defisit anggaran yang menyebabkan adanya pembiayaan daerah, dan juga mengurangi sumber penerimaan yang berasal dari Dana Perimbangan Pusat yang berarti meningkatkan kemandirian daerah (Abdul, 2013).

Tujuan diselenggarakannya otonomi daerah adalah agar pembangunan di daerah berjalan seiring dengan pembangunan pusat yang merupakan bentuk koreksi atas pelaksanaan pembangunan ekonomi yang selama ini menitik beratkan pembangunan di pusat dan kurang memperhatikan perkembangan pembangunan daerah. Dengan adanya kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, semakin rendah ketergantungan dana dari pusat, maka semakin nyata kualitas sumber daya daerah itu sendiri. Dengan kata lain, tingkat kemandiriannya lebih baik dengan ditunjang oleh faktor Pendapatan Asli Daerah dan berbagai sektor yang ada. Secara rinci pembagian kewenangan antara Pusat dan Provinsi diatur dalam PP No.33 Tahun 2004, sedangkan kewenangan Kabupaten/Kota adalah seluruh kewenangan diluar yang telah menjadi kewenangan Pusat dan Provinsi. Kewenangan pusat diluar 5 kewenangan yang tidak diserahkan adalah kewenangan yang bersifat perencanaan makro, penetapan pedoman, norma, kriteria dan standar. Sementara kewenangan provinsi adalah yang bersifat lintas kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan (Anwar, dkk, 2003). Realitas



hubungan fiskal antara pusat-daerah ditandai dengan tingginya kontrol pusat terhadap proses pembangunan daerah. Ini jelas terlihat dari rendahnya proporsi PAD (Pendapatan Asli Daerah) terhadap total pendapatan daerah dibanding besarnya subsidi yang diberikan dari pusat. Indikator desentralisasi fiskal adalah rasio antara PAD dan total pendapatan daerah. PAD terdiri atas pajak-pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan dari dinas, laba bersih dari perusahaan daerah (BUMD) dan penerimaan lain-lain yang sah (Kuncoro, 2004).

Desentralisasi fiskal berdampak meningkatkan pertumbuhan ekonomi relatif lebih tinggi di daerah pusat bisnis dan daerah yang kaya akan sumber daya alam dari pada daerah bukan pusat bisnis dan miskin sumber daya alam (Waluyo, 2007). Sedangkan Frida (2009) dalam Anwar (2013) mengemukakan bahwa hampir di semua daerah di Indonesia rasio DAU terhadap TPD melebihi 50%. Hanya beberapa daerah yang menunjukkan struktur PAD yang kuat yaitu daerah yang terletak di Pulau Jawa yang secara historis memang sudah kuat. Sementara diluar Pulau Jawa hanya beberapa Provinsi yang menunjukkan peningkatan. \]Pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 5,21% dan yang mempengaruhi pertumbuhan PAD yang belum memberikan peranan tambahan terhadap anggaran wilayah (Rudi, 2011). Maka dari itu diperlukan pengukuran atas derajat *Fiscal independence* suatu daerah yang erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi dimna  $FI = f(y)$ .

Dalam teorinya, Thesaurianto (2007) mengatakan bahwa "perkembangan ekonomi menyebabkan pungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah; dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan

pengeluaran pemerintah juga meningkat, oleh karena itu dalam keadaan normal, meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah juga semakin besar, begitu pula pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar" dengan alasan tersebut maka sangat diperlukan pengukuran atas derajat *Fiscal independence* suatu daerah yang bersumber dari PAD.

*Fiscal independence* merupakan salah satu aspek yang sangat penting dari otonomi daerah secara keseluruhan. Anwar (2013) menyebutkan bahwa manfaat adanya *Fiscal independence* adalah :

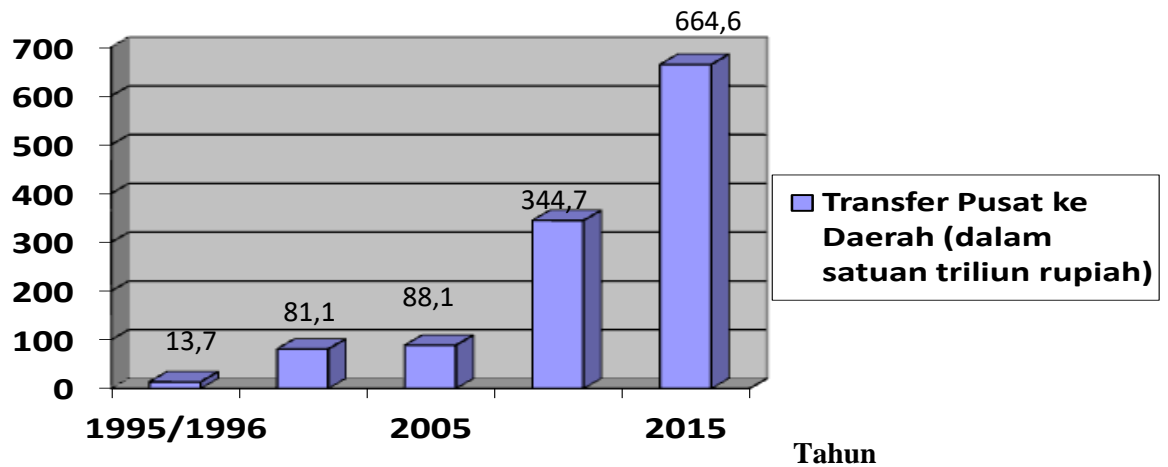
- a. Mendorong peningkatan partisipasi prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan serta akan mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumberdaya serta potensi yang tersedia di daerah.
- b. Memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah yang memiliki informasi lebih lengkap.

Disimpulkan bahwa *fiscal independence* (kemandirian fiskal) daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD seperti pajak dan retribusi daerah dan lain-lain dan pembangunan daerah bisa diwujudkan hanya apabila disertai *Fiscal independence* yang efektif, ini berarti bahwa pemerintah daerah secara finansial harus bersifat independen terhadap pemerintah pusat dengan jalan sebanyak mungkin menggali sumber-sumber PAD seperti pajak, retribusi dan sebagainya (Anwar,2013).

*Fiscal independence* merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan daerah yang dijalankan, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari pemerintah pusat (World Bank,1994 dalam Kuncoro,2007). Menurut Halim (2001), ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi (desentralisasi fiskal) adalah (1) kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan; (2) Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh karena itu, PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Faktanya kondisi keuangan daerah di seluruh Indonesia pada era otonomi sangat berbeda dengan kondisi keuangan daerah sebelum berlakunya otonomi daerah. Bentuk dana perimbangan, khususnya dana transfer dari pusat yang dialokasikan untuk pembiayaan kegiatan otonomi daerah telah mengalir dan meningkat dari tahun ke tahun dalam jumlah yang relatif besar. Dari 13,7 Triliun Rupiah sebelum adanya desentralisasi fiskal, menjadi sekitar 664,6 triliun Rupiah pada Tahun 2015. Secara rinci dapat dilihat pada Gambar 1. berikut :

## Transfer



Gambar 1. Peningkatan Dana Transfer dari Pusat ke Daerah (1995 – 2015)  
 Sumber : Departemen Keuangan RI, 2015

Dari Gambar 1 di atas menunjukkan bahwa transfer pusat ke daerah terus mengalami peningkatan, pada era sebelum diberlakukannya otonomi daerah transfer dari pusat yaitu sebesar 13,7 triliun rupiah, kemudian meningkat menjadi 88,1 triliun rupiah pada tahun 2005 dan terus meningkat menjadi 664,6 triliun rupiah pada tahun 2015.

Kondisi fiskal tersebut juga berlaku di Provinsi Lampung, peranan Dana Perimbangan, terutama Dana Alokasi Umum (DAU) yang berasal dari pemerintah menunjukkan nilai yang sangat besar, bahkan besaran nilai transfer pusat tersebut berlaku baik sebelum dan sesudah pelaksanaan desentralisasi fiskal. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1. berikut :

Tabel 1. Proporsi Dana Perimbangan Terhadap APBD Provinsi Lampung Tahun 2001-2015 (Juta Rupiah)

Tahun	Dana Perimbangan			Total Dana Perimbangan
	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	DAU	DAK	
2001	93.322,04	180.303,37	0,00	273.625,40
2002	117.073,70	211.110,00	0,00	328.183,70
2003	125.383,22	263.465,79	4.600,00	393.449,02
2004	123.953,13	286.822,00	0,00	410.775,13
2005	185.410,33	310.835,00	0,00	496.245,33
2006	202.068,88	460.898,00	0,00	662.966,88
2007	176.164,95	509.656,00	0,00	686.784,79
2008	208.108,99	560.677,87	0,00	768.786,86
2009	160.504,61	628.505,67	40.016,00	829.026,29
2010	162.766,65	687.745,87	37.934,00	888.446,52
2011	251.104,00	769.973,00	42.210	1.063.287,00
2012	310.625,00	939.139,00	31.088,00	1.280.852,00
2013	263.272,00	1.060.663,00	60.108,00	1.384.044,00
2014	217.463,00	946.711,00	14.655,00	1.178.829,00
2015	357.798,00	1.308.767,00	56.435,00	1.723.000,00

Sumber : Departemen Keuangan RI, dari berbagai edisi.

Menurut Widjaja (2014) penerapan pembagian dana perimbangan meliputi bagi hasil atas penerimaan BHPBP, DAU dan DAK akan menimbulkan dampak yang sangat signifikan baik dari segi jumlah dana maupun dari segi mekanisme pengalokasian dan pertanggung jawaban dana yang dialokasikan ke daerah melalui APBN. Transfer ke daerah melalui dana perimbangan diperkirakan akan menyebabkan peranan pengelolaan fiskal pemerintah pusat dalam pengelolaan fiskal secara umum akan semakin berkurang. Sebaliknya, proporsi total pengeluaran pemerintah daerah melalui APBD akan tampak apabila dibandingkan dengan alokasi dana ke daerah pada tahun 2000 yang meliputi dana rutin dan dana pembangunan.

Dengan desentralisasi ini, maka secara umum hal-hal yang berkaitan dengan substansi distribusi dilakukan oleh pemerintah yang tingkatnya lebih tinggi (Pemerintah Pusat), sementara fungsi alokasi akan dijalankan oleh daerah, karena daerah lebih dekat kepada masyarakat sehingga dapat diketahui prioritas dan kebutuhan masyarakat setempat khususnya kabupaten/kota di Provinsi Lampung, agar dapat meningkatkan PAD untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat dan meningkatkan *Fiscal independence*. Salah satu langkah penting yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerahnya adalah menghitung potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang riil yang dimiliki. Untuk itu diperlukan metode penghitungan potensi PAD yang sistematis dan rasional (Anwar, 2013).

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonom yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonomi harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD khususnya pajak dan retribusi daerah menjadi bagian sumber keuangan terbesar (Koswara, 1999 dalam Ladjin, 2008). Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ada beberapa faktor yang perlu diberdayakan diantaranya adalah investasi dan PDRB perkapita dan beberapa faktor lain.

Untuk menjamin terjadinya peningkatan pada derajat *Fiscal independence* negara maju seperti Jepang mendirikan suatu lembaga dengan nama IFI (*Independence*

*Fiscal Institution*). IFI didirikan dengan fungsi sebagai lembaga yang menilai relevansi potensi fiskal Jepang, tidak hanya itu IFI juga berperan sebagai mediator dalam masalah keuangan publik serta mengevaluasi konsistensi RUU Anggaran di Jepang (Kopits,2016).

Penelitian ini menggunakan investasi, laju pertumbuhan ekonomi, dan tenaga kerja sebagai faktor yang mempengaruhi derajat *Fiscal independence* di Provinsi Lampung sejak era otonomi daerah yaitu tahun 2001-2015. Investasi memainkan peranan penting dalam menggerakkan kehidupan ekonomi bangsa, karena pembentukan modal memperbesar kapasitas produksi, menaikkan pendapatan nasional maupun menciptakan lapangan kerja baru, dalam hal ini akan semakin memperluas kesempatan kerja. Salah satu komponen pengeluaran PDRB adalah investasi. Dalam konteks PDRB penggunaan, investasi dikenal sebagai pembentukan modal tetap (*Gross Fixed Capital Formation*) ditambah perubahan stok (*Increase in Stock*). Dalam pembangunan ekonomi, investasi mempunyai dua peranan penting dalam makro ekonomi. *Pertama*, pengaruhnya terhadap permintaan agregat, dan ini akan mendorong output dan kesempatan kerja. Ini dampak atau peran jangka pendeknya. *Kedua*, efeknya terhadap pembentukan kapital. Adanya investasi akan menambah berbagai peralatan, mesin, bangunan dan sebagainya (Mudrajad dkk, 2005 dalam Ladjin, 2008). Dalam jangka panjang, tindakan ini akan meningkatkan potensi output, dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara terus menerus, baik melalui penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA).

Menurut Adhidarma (2016), uji kausalitas pertumbuhan investasi dan pertumbuhan PAD menunjukkan bahwa di antara keduanya ada hubungan dua

arah. Lebih lanjut, ketika dilakukan regresi, ditemukan bahwa variasi pertumbuhan PAD dapat dijelaskan oleh pertumbuhan investasi sekitar 61 persen. Pertumbuhan PAD tahun ini dipengaruhi secara signifikan oleh pertumbuhan investasi 3, 8, dan 12 kuartal sebelumnya atau dengan kata lain pertumbuhan investasi sampai dengan 3 tahun yang lalu pun berdampak pada pertumbuhan PAD tahun ini. Sementara itu pertumbuhan investasi pada kuartal berjalan tidak ditemukan bukti mempengaruhi pertumbuhan PAD pada kuartal yang sama.

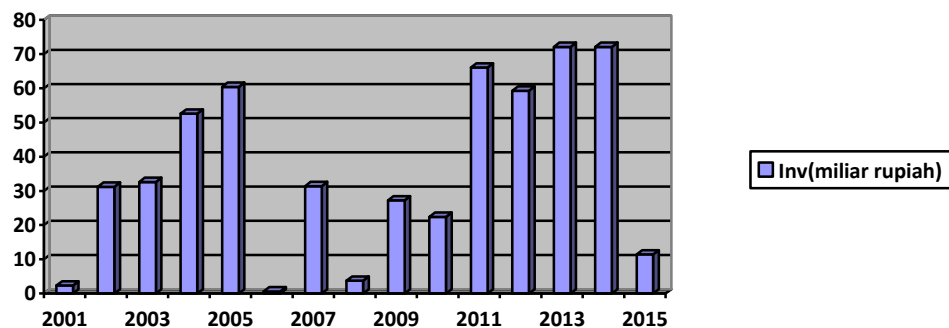
Menurut Mita (2012), investasi akan menambah jumlah (*stock*) dari capital. Keberhasilan daerah untuk meningkatkan daya tariknya terhadap investasi salah satunya tergantung dari kemampuan daerah dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan investasi dan dunia usaha serta peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Kemampuan daerah untuk menentukan faktor-faktor yang dapat digunakan sebagai ukuran daya saing perekonomian daerah relatif terhadap daerah lainnya juga sangat penting dalam upaya meningkatkan daya tariknya dan memenangkan persaingan.

Penyertaan modal pada BUMD merupakan bagian dari investasi jangka panjang daerah, yang jumlah akumulatifnya disajikan dalam neraca pada sisi aset. Dalam penganggarannya, penyertaan modal atau investasi ini tidak diakui sebagai belanja, namun dimasukkan sebagai pengeluaran pembiayaan. Di sisi lain, hasil yang diterima dari investasi yang telah dilakukan dikategorikan sebagai PAD. Oleh karena itu, kebijakan umum APBD akan memuat informasi tentang pendapatan dan pembiayaan ini, jadi investasi merupakan salah satu prasyarat



yang harus dipenuhi bagi suatu perekonomian yang sedang membangun disamping faktor pertumbuhan penduduk dan kemajuan ekonomi (Yuliadi, 2007).

Pembangunan di Provinsi Lampung yang berlangsung secara menyeluruh dan berkesinambungan telah meningkatkan perekonomian masyarakat. Pencapaian hasil-hasil pembangunan yang sangat dirasakan masyarakat merupakan agregat pembangunan dari Provinsi Lampung yang tidak terlepas dari usaha keras bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat. Namun di sisi lain berbagai kendala dalam memaksimalkan potensi sumber daya manusia dan sumber modal masih dihadapi oleh penentu kebijakan di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota. Berikut merupakan pertumbuhan investasi di Provinsi Lampung tahun 2001-2015:

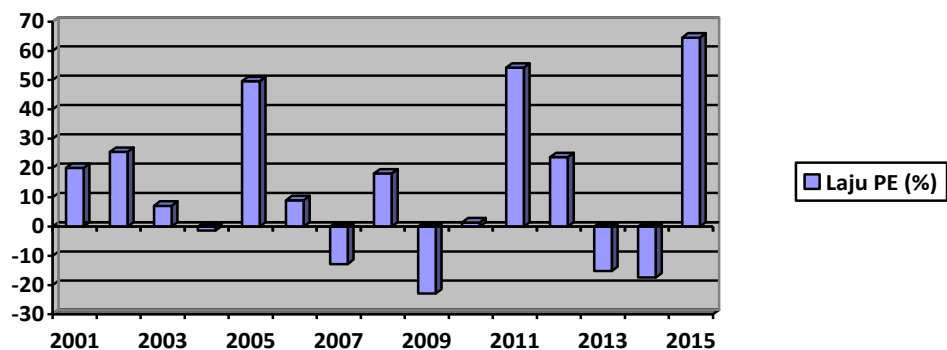


Gambar 2. pertumbuhan investasi di Provinsi Lampung tahun 2001-2015  
Sumber: BPS Provinsi Lampung

Selain investasi faktor lain yang digunakan dalam penelitian ini yaitu PDRB perkapita Provinsi Lampung tahun 2001-2015. PDRB perkapita merupakan salah satu ukuran bagi kemakmuran suatu daerah.. Produk Domestik Regional Bruto adalah total nilai tambah yang dihasilkan dari semua sektor ekonomi yang tersedia di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu, diperoleh dari semua faktor

produksi di wilayah itu dalam jangka waktu tertentu. Semakin tinggi tingkat pendapatan, kekayaan dan konsumsi seseorang berarti semakin tinggi kemampuan orang tersebut untuk membayar dan berpengaruh dalam penerimaan daerah (Ladjin,2008).

Melihat Pembangunan ekonomi Provinsi Lampung memiliki prospek dan peluang amat besar dalam memacu pertumbuhan ekonomi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan pengukuran atas nilai tambah yang dihasilkan akibat adanya berbagai ekonomi dalam suatu wilayah. Data Produk Dometik Regional Bruto tersebut menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki. Berikut merupakan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung tahun 2001-2015:



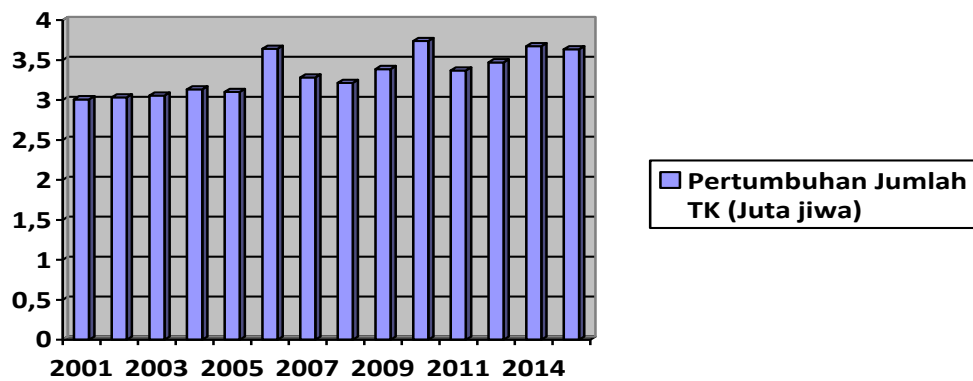
Gambar 3. laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung tahun 2001-2015  
Sumber: BPS Provinsi Lampung, dari berbagai edisi.

Faktor lain yang juga menjadi faktor dalam penilaian tiderajat *fiscal independence* dalam penelitian ini yaitu jumlah tenaga kerja. Dimana tenaga kerja mampu menghasilkan pendapatan dari kekayaan seperti sewa, bunga dan deviden, serta pembayaran transfer atau penerimaan dari pemerintah seperti tunjangan sosial, atau asuransi pengangguran (Asmuruf, 2015). Tenaga kerja merupakan indikator

penting yang menjamin keberlangsungan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Para ahli ekonomi yang dipelopori Adam Smith menganggap bahwa tenaga kerja merupakan input yang potensial yang dapat digunakan sebagai faktor produksi untuk meningkatkan produksi suatu rumah tangga perusahaan dan dengan pertumbuhan jumlah tenaga kerja yang terus meningkat kemungkinan juga berdampak pada peningkatan jumlah PAD yang menjadi tolak ukur derajat *fiscal independence*.

Perluasan penyerapan tenaga kerja diperlukan untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk usia muda yang masuk ke pasar tenaga kerja. Ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dan penciptaan lapangan kerja akan menyebabkan tingginya angka pengangguran. Kemudian, meningkatnya angka pengangguran akan mengakibatkan pemborosan sumber daya dan potensi angkatan kerja yang ada, meningkatnya beban masyarakat, merupakan sumber utama kemiskinan dan mendorong terjadinya peningkatan keresahan sosial, serta menghambat pembangunan ekonomi dalam jangka panjang (Depnakertrans, 2004).

Provinsi Lampung merupakan daerah yang padat akan penduduk dengan lapangan pekerjaan yang cukup banyak baik di Instansi Pemerintah maupun swasta. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, jumlah tenaga kerja dari tahun ke tahun hal ini dapat di lihat pada gambar 4. Berikut ini:



Gambar 4. Pertumbuhan Jumlah Tenaga Kerja Provinsi Lampung 2001-2015

Sumber: BPS Provinsi Lampung.

Berdasarkan gambaran yang telah diuraikan di atas, maka sudah selayaknya pemerintah provinsi Lampung senantiasa berupaya mencari dan mengembangkan potensi daerah guna memenuhi kebutuhan pembangunan yang setiap tahunnya semakin meningkat. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis pengaruh faktor investasi, laju pertumbuhan ekonomi, dan tenaga kerja terhadap derajat kemandirian fiskal di Provinsi Lampung sejak era otonomi daerah yaitu tahun 2001-2015.

## B. Rumusan Masalah

Manajemen pemerintah daerah di Indonesia memasuki era baru seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Kebijakan terkait efektif diberlakukan per Januari tahun 2001 (UU ini dalam perkembangannya diperbarui dengan dikeluarkannya UU No.32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004). Diberlakukannya undang-undang ini memberikan peluang bagi daerah untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangannya dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah (Ladjin, 2008).

PAD dijadikan salah satu barometer dalam pelaksanaan otonomi daerah. Masalahnya proporsi penerimaan yang berasal dari jumlah potensial PAD provinsi jumlahnya relatif kecil, sehingga terjadi ketidakseimbangan keuangan daerah (*fiscal gap*) antara kemampuan daerah (*fiscal capacity*) dan kebutuhan daerah (*fiscal need*). Kondisi inilah yang menciptakan ketergantungan pemerintah kabupaten/kota di provinsi pada pembiayaan pemerintah pusat. Sehingga otonomi daerah yang diharapkan dapat menciptakan kemandirian daerah dan tidak menimbulkan ketergantungan yang tinggi kepada pemerintah pusat yang.

Dengan latar belakang tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana perkembangan derajat *fiscal independence* di Provinsi Lampung sejak era otonomi daerah ?
2. Bagaimana pengaruh investasi, laju pertumbuhan ekonomi, dan tenaga kerja terhadap derajat *fiscal independence* di Provinsi Lampung sejak era otonomi daerah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Memperoleh gambaran *fiscal independence* dalam mendukung kemandirian ekonomi di Provinsi Lampung sejak era otonomi daerah.
2. Memperoleh analisa pengaruh investasi, laju pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja terhadap derajat *fiscal independence* di Provinsi Lampung sejak era otonomi daerah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang memerlukan, terutama Pemerintah Provinsi Lampung terkait dengan pemanfaatan dan peningkatan potensi penerimaan PAD.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berbagai kajiankajian yang berkaitan dengan kemandirian fiskal di era otonomi daerah, Indonesia umumnya dan di Provinsi Lampung khususnya, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kerangka berpikir serta model pengembangan dan aplikasinya.
3. Sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan guna peningkatan derajat *fiscal independence* di Provinsi Lampung.
4. Sebagai bahan referensi bagi peneliti, mahasiswa ataupun dosen lain yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama.
5. Sebagai informasi dan pengetahuan bagi peneliti maupun orang lain untuk menyelaraskan teori dan kenyataan dilapangan.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Landasan Teori**

#### **1. Otonomi Daerah**

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 5. “ Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan ”. Dari pengertian tersebut di atas dapat diartikan bahwa otonomi daerah merupakan kemerdekaan atau kebebasan menentukan aturan sendiri berdasarkan perundangundangan, dalam memenuhi kebutuhan daerah sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh daerah. Otonomi daerah yang sudah berjalan lebih dari tujuh tahun diharapkan bukan hanya pelimpahan wewenang dari pusat kepada daerah untuk menggeser kekuasaan. Hal ini ditegaskan oleh Kaloh (2002), bahwa otonomi daerah harus didefinisikan sebagai otonomi bagi rakyat daerah bukan otonomi ” daerah ” dalam pengertian wilayah/teritorial tertentu di tingkat lokal. Otonomi daerah bukan hanya merupakan pelimpahan wewenang tetapi juga peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Dengan otonomi, Daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian (*sharing*) dari Pemerintah Pusat dan menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat. Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam pembangunan daerah melalui usaha-usaha yang sejauh mungkin mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, karena pada dasarnya terkandung tiga misi utama sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut, yaitu (Thesaurianto, 2007) :

- a. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat
- c. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Pelaksanaan otonomi daerah juga diharapkan untuk mengurangi ketergantungan lokal pada pemerintah pusat, di mana pemerintah daerah diharapkan menjadi lebih berkontribusi dalam hal pengelolaan fiskal, dan mampu membiayai pembangunan daerah sesuai dengan kemampuan fiskal yang bersumber dari potensi daerah tersebut (Ahmad, 2011). Dengan kondisi seperti ini, peranan investasi swasta dan perusahaan milik daerah sangat diharapkan sebagai pemacu utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah (*enginee of growth*). Daerah juga diharapkan mampu menarik investor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta menimbulkan efek *multiplier* yang besar.



Widjaja (2014) menyebutkan bahwa melalui otonomi diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan pemerintah pusat diharapkan tidak terlalu aktif mengatur daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu memainkan peranannya dalam membuka peluang memajukan daerah dengan melakukan identifikasi potensi sumber-sumber pendapatannya dan mampu menetapkan belanja daerah secara ekonomi yang wajar, efisien, efektif, termasuk kemampuan perangkat daerah meningkatkan kinerja, mempertanggungjawabkan kepada pemerintah atasannya maupun kepada publik/masyarakat.

Otonomi luas yang diwujudkan dalam bentuk 31 urusan menimbulkan keterbatasan pembiayaan yang menyebabkan banyak daerah mengalami kesulitan. Keadaan tersebut semakin rumit dengan adanya tendensi daerah membuat struktur organisasi yang 'gemuk' akibat tekanan birokrasi melalui tambahan jabatan yang memicu meningkatnya kebutuhan pegawai yang menyebabkan meningkatnya biaya aparatur atau *overhead cost*. Sementara, pengalaman menunjukkan hampir di semua daerah persentase PAD relatif kecil (Yudianto, 2015).

## **2. Desentralisasi Fiskal**

Secara luas desentralisasi adalah wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah di negara kesatuan meliputi segenap kewenangan pemerintahan kecuali beberapa urusan yang dipegang oleh pemerintah pusat seperti hubungan luar negeri, pengadilan, moneter dan keuangan serta pertahanan keamanan (Adisubrata, 2002). Jadi, secara riil desentralisasi merupakan kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat, disesuaikan dengan kemampuan nyata dari daerah yang bersangkutan (seperti sumber daya manusia, pendapatan daerah,

Produk Domestik Regional Bruto(PDRB). Desentralisasi fiskal diartikan sebagai pelimpahan wewenang dibidang penerimaan anggaran atau keuangan yang sebelumnya tersentralisasi, baik secara administrasi maupun pemanfaatannya diatur atau dilakukan oleh pemerintah pusat. Dengan terjadinya pelimpahan sebagian wewenang terhadap sumber-sumber penerimaan di daerah, diharapkan daerah-daerah dapat melaksanakan tugas-tugas rutin, pelayanan publik dan meningkatkan investasi yang produktif (*capita investment*) di daerahnya. Oleh karena itu, salah satu makna desentralisasi fiskal dalam bentuk pemberian otonomi di bidang keuangan (sebagian sumber penerimaan ) kepada daerah-daerah merupakan suatu proses pengintensifikasian peranan dan sekaligus pemberdayaan daerah dalam pembangunan. Desentralisasi fiskal memerlukan pergeseran beberapa tanggung jawab terhadap pendapatan (*revenue*) dan / atau pembelanjaan (*expenditure*) ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah. Faktor yang sangat penting dalam menentukan desentralisasi fiskal adalah sejauh mana pemerintah daerah diberi kewenangan (otonomi) untuk menentukan alokasi atas pengeluarannya sendiri. Faktor lain yang juga penting adalah kemampuan daerah untuk meningkatkan penerimaan mereka (PAD). Tetapi desentralisasi fiskal tidak semata-mata peningkatan PAD saja tetapi lebih dari itu adalah kewenangan dalam mengelola potensi daerah demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat .

Secara harafiah desentralisasi fiskal memberikan pengertian adanya pemisahan yang semakin tegas dan jelas dalam urusan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pemisahan dimaksud bisa tercermin pada kedua sisi anggaran; penerimaan dan pengeluaran. Di sisi penerimaan, daerah akan memiliki kewenangan yang lebih besar dalam *Tax Policy*. Menurut Bahl (1999)

desentralisasi fiskal harus diikuti oleh kemampuan pemerintah daerah dalam memungut pajak (*taxing power*). Secara teori adanya kemampuan pajak, maka pemerintah daerah akan memiliki sumber dana pembangunan yang besar. Pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah dapat berdampak positif yang akan digunakan untuk membangun berbagai infrastruktur dan membiayai berbagai pengeluaran publik.

Menurut Bird dan Vaillancourt (2000), ada dua persyaratan penting untuk kesuksesan desentralisasi fiskal, terlepas dari keseimbangan makro atau efisiensi mikro. *Pertama*, proses pengambilan keputusan di daerah harus demokratis, yaitu pengambilan keputusan tentang manfaat dan biayanya harus transparan dan pihak-pihak yang terkait memiliki kesempatan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan tersebut. *Kedua*, yang lebih sesuai dengan rancangan kebijakan biayabiaya dari keputusan yang diambil, sepenuhnya harus ditanggung oleh masyarakat setempat. Untuk itu, seharusnya tidak perlu terjadi “ ekspor pajak “ dan tidak ada tambahan transfer dari jenjang pemerintahan yang lain. Maksudnya, pemerintah daerah perlu memiliki kontrol atas tarif dari paling tidak beberapa jenis pajak.

Pelaksanaan desentralisasi adalah agar daerah dapat menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas, sesuai dengan kebutuhan warganya dan dapat dijangkau dengan mudah. Partisipasi masyarakat menjadi salah satu kunci sukses dari penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah. Salah satu tujuan desentralisasi adalah agar masyarakat dan pemangku kepentingan dapat lebih

mudah berpartisipasi dalam proses kebijakan di daerah. Maka tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah benar-benar menjamin kepentingan warga negara (Yudianto, 2015).

## **2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang berasal dari sumber-sumber keuangan daerah seperti pajak, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dinas-dinas dan penerimaan lain-lain. Kemampuan daerah dalam membiayai sendiri pembanguann daerahnya masih mengalami kendala berupa rendahnya kemampuan daerah dalam meningkatkan PAD. Indikator rendahnya kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dapat dilihat dari Indeks Kemampuan Rutin (IKR) yang diperoleh dari besarnya perubahan PAD terhadap pengeluaran rutin daerah dalam persentase pada tahun yang sama (Radianto, 1997). Pengertian PAD menurut JB. Kristiadi (1985) adalah pendapatan daerah yang tergantung pada keadaan ekonomi pada umumnya dan potensi dari sumber-sumber PAD itu sendiri. Menurut Alfian Lains (1985) PAD adalah penerimaan rutin didalam APBD yang berasal dari daerah yang bersangkutan sumber PAD itu terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan perusahaan daerah, penerimaan dinasdinas dan lain-lain.

Berdasarkan Pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004 bahwa Pendapatan asli Daerah

(PAD) bersumber dari :

a. Pajak daerah

Menurut UU No.34 Tahun 2000, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah

tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Sesuai Undang-Undang nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah-jenis pajak provinsi terdiri dari:

1. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air,
2. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air,
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor,
4. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

b. Retribusi daerah

Menurut UU No. 34 Tahun 2000, Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan /atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan .

Retribusi daerah dibagi atas tiga golongan yaitu :

1. Retribusi Jasa Umum,
2. Retribusi Jasa Usaha, dan
3. Retribusi Perijinan Tertentu.

Menurut Davey (1988, 30), retribusi adalah suatu pembayaran langsung oleh mereka yang menikmati suatu pelayanan dari pemerintah. Pembayaran tersebut biasanya dimaksudkan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya pelayanannya. Sedangkan menurut Davey (1989, 95), kebijakan memungut bayaran untuk barang dan layanan yang disediakan pemerintah

berpangkal pada Pengertian efisiensi ekonomis. Menurutnya, seseorang bebas untuk menentukan besar layanan tertentu yang hendak dinikmatinya. Lebih lanjut dikatakan, bahwa dalam teori ekonomis, harga barang atau layanan yang disediakan pemerintah hendaknya didasarkan pada biaya tambahan (*marginal cost*) yaitu biaya untuk melayani konsumen terakhir. Karena sebagian besar layanan pemerintah merupakan hak monopoli, maka manfaat ekonomis tertinggi untuk masyarakat adalah jika penetapan harga layanan tersebut diumpamakan adanya suatu persaingan pasar. Dengan demikian pemerintah akan memproduksi jasa tersebut pada titik tempat biaya tambahan sama dengan penerimaan tambahan (*marginal revenue*).

c. PAD lain-lain yang sah

Pendapatan lain-lain yang sah terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat. Pemerintah mengalokasikan dana darurat yang berasal dari APBN untuk keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD. Pendapatan hibah merupakan bantuan yang tidak mengikat yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui pemerintah.

## **2.2 Hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Investasi**

Dalam pembangunan ekonomi, investasi mempunyai dua peranan penting dalam makro ekonomi. *Pertama*, pengaruhnya terhadap permintaan agregat, dan ini akan mendorong output dan kesempatan kerja. Ini dampak atau peran jangka pendeknya. *Kedua*, efeknya terhadap pembentukan kapital. Adanya investasi akan menambah

berbagai peralatan, mesin, bangunan dan sebagainya (Mudrajad dkk, 2005 dalam Ladjin, 2008). Dalam jangka panjang, tindakan ini akan meningkatkan potensi output, dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara terus menerus, baik melalui penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA).

Menurut Boediono (2001) dalam Mita (2012), investasi akan menambah jumlah (*stock*) dari capital. Keberhasilan daerah untuk meningkatkan daya tariknya terhadap investasi salah satunya tergantung dari kemampuan daerah dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan investasi dan dunia usaha serta peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Kemampuan daerah untuk menentukan faktor-faktor yang dapat digunakan sebagai ukuran daya saing perekonomian daerah relatif terhadap daerah lainnya juga sangat penting dalam upaya meningkatkan daya tariknya dan memenangkan persaingan.

Investasi menurut Fitzgerald dalam Sutrisno (2008), investasi adalah suatu aktivitas yang berhubungan dengan usaha penarikan sumber-sumber (dana) yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang dan dengan barang modal akan dihasilkan aliran produk baru di masa yang akan datang. Dari definisi ini investasi dikonstruksikan sebagai sebuah kegiatan untuk :

1. Penarikan sumber dana yang digunakan untuk pembelian barang modal.
2. Barang modal itu akan dihasilkan produk baru.

Menurut Kamaruddin Ahmad dalam Sutrisno (2008), pengertian investasi adalah menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau

keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut. Pengertian investasi ini menekankan pada penempatan uang atau dana. Tujuan investasi ini adalah untuk memperoleh keuntungan. Hal ini erat kaitannya dengan penanaman investasi di bidang pasar modal. Budi Sutrisno dan Salim HS mengemukakan pengertian investasi, Investasi ialah penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik investor asing maupun domestik dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi, yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan.

Selanjutnya Kamarauddin dalam Sutrisno (2008) memberikan pengertian investasi dalam tiga artian, yaitu :

- (1) Investasi yaitu suatu tindakan untuk membeli saham, obligasi atau surat penyertaan lainnya.
- (2) Investasi merupakan suatu tindakan untuk membeli barang-barang modal.
- (3) Investasi adalah pemanfaatan dana yang tersedia untuk dipergunakan dalam produksi dengan pendapatan di masa yang akan datang.

Dalam definisi ini, investasi dikonstruksikan sebagai tindakan membeli saham, obligasi dan barang-barang modal. Hal ini erat kaitannya dengan pembelian saham pada pasar modal, padahal penanaman investasi tidak hanya dipasar modal saja, tetapi juga diberbagai bidang lainnya seperti di bidang pariwisata, pertambangan minyak dan gas bumi, pertanian, kehutanan dan lain sebagainya (Sutrisno, 2008).

Isilah Investasi sendiri berasal dari kata *investire* yang berarti memakai atau menggunakan. Investasi adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk



dikembangkan dan hasil dari sesuatu yang dikembangkan tersebut akan dibagi sesuai dengan yang diperjanjikan. Berbicara mengenai macam macam investasi, Investasi sendiri dapat dibagi menjadi dua macam yaitu investasi asing dan investasi domestik. Investasi Asing adalah investasi yang bersumber dari pembiayaan luar negeri, sedangkan Investasi Domestik ialah investasi yang bersumber dari pembiayaan dalam negeri. Investasi pada umumnya digunakan untuk pengembangan usaha yang terbuka dan tujuan investasi tersebut untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Berikut merupakan jenis-jenis investasi (Sutrisno, 2008) :

#### 1. Jenis Investasi berdasarkan Asetnya

Jenis investasi berdasarkan asetnya merupakan penggolongan investasi dari aspek modal atau kekayaan. Investasi berdasarkan asetnya terbagi atas dua jenis, yaitu *real asset* dan *financial asset*. *Real Asset* adalah investasi yang berwujud seperti gedung-gedung, kendaraan dan lain sebagainya, sedangkan *Financial Asset* merupakan dokumen (surat-surat) klaim tidak langsung dari pemegangnya terhadap aktivitas riil pihak yang menerbitkan sekuritas tersebut.

#### 2. Jenis Investasi berdasarkan Pengaruhnya

Jenis investasi menurut pengaruhnya merupakan investasi yang didasarkan pada faktor-faktor yang memengaruhi atau tidak berpengaruh dari kegiatan investasi. Jenis investasi berdasarkan pengaruhnya dapat dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu investasi *autonomus* (berdiri sendiri) dan Investasi *Induces* (memengaruhi atau menyebabkan). Investasi *Autonomus* adalah investasi yang tidak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, bersifat spekulatif. Contoh investasi ini : pembelian surat-surat berharga. Investasi *Induced* ialah investasi yang

dipengaruhi kenaikan permintaan akan barang dan jasa serta tingkat pendapatan. Contoh investasi ini : penghasilan transitori, yaitu penghasilan yang diperoleh selain dari bekerja, seperti bunga dan sebagainya.

### 3. Jenis Investasi berdasarkan Sumber Pembiayaannya

Jenis investasi berdasarkan sumber pembiayaannya merupakan investasi yang didasarkan pada asal-usul investasi yang diperoleh. Jenis investasi ini dapat dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu investasi yang bersumber dari modal asing dan investasi yang bersumber dari modal dalam negeri.

### 4. Jenis Investasi berdasarkan bentuknya

Jenis investasi berdasarkan bentuknya merupakan investasi yang didasarkan pada cara menanamkan investasinya. Jenis investasi ini dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu investasi portofolio dan investasi langsung. Investasi Portopolio dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat berharga, contohnya seperti saham dan obligasi. Investasi langsung merupakan bentuk investasi yang dilakukan dengan membangun, membeli total, atau mengakuisi suatu perusahaan.

Teori tentang investasi pada umumnya hendak menjelaskan faktor-faktor (variabel) yang mempengaruhi investasi. Beberapa faktor yang diduga kuat pengaruhnya terhadap investasi antara lain : tingkat bunga, penyusutan, kebijaksanaan perpajakan serta perkiraan (*expectation*) (Ladjin,2008). Berikut merupakan faktor-faktor lain yang mempengaruhi investasi :

#### 1. Investasi tetap pada perusahaan (*cousiness fixed investment*)

MEC (*Marginal Efficiency of Capital*) menggambarkan tingkat pendapatan (*rate of return*) dari investasi baru yang diharapkan akan dilakukan. Keputusan seorang pengusaha untuk melakukan investasi tergantung pada besarnya MEC ini dibandingkan dengan tingkat bunga pasar.

## 2. Jumlah Modal yang diinginkan (*desired capital stock*)

Keinginan seseorang pengusaha melakukan investasi dipengaruhi oleh pendapatan yang diharapkan dan biaya modal untuk membiayai investasi. Salah satu komponen biaya modal yang utama adalah tingkat bunga .

## 3. Prinsip akselerasi (*Acceleration Principles*)

Prinsip akselerasi mengatakan bahwa tingkat/besarnya investasi proporsional terhadap perubahan dari output (GNP). Investasi netto merupakan fungsi dan pertumbuhan output. Konsekuensinya suatu perekonomian yang tidak mengalami pertumbuhan output maka investasi juga akan sama dengan nol (Nopirin, 1996 dalam Ladjin, 2008).

### **2.3 Hubungan Antara Pendapatan Asli Daerah dan laju PE (PDRB)**

Santosa dan Rahayu (2005) dalam Eka (2011) mengatakan hubungan antara PAD dengan PDRB merupakan hubungan fungsional, karena PDRB merupakan fungsi dari PAD. Dengan meningkatnya PDRB maka akan menambah penerimaan pemerintah daerah untuk membiayai program-program pembangunan. Selanjutnya akan mendorong peningkatan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat yang diharapkan akan dapat meningkatkan produktivitasnya.

Nilai PDRB perkapita diperoleh dari membagi pendapatan nasional bruto atau pendapatan domestik bruto pada satu tahun tertentu dengan jumlah penduduk pada tahun tersebut. Dengan demikian, PDRB perkapita dapat dihitung dengan menggunakan salah satu persamaan sebagai berikut (Sadono Sukirno, 1999) :

$$a. \text{ Perkapita PNB} = \frac{\text{Pendapatan Nasional Bruto}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

$$b. \text{ Perkapita PDB} = \frac{\text{Pendapatan domestik Bruto}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

Adapun untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah yaitu dengan cara sebagai berikut :

$$\text{Laju PE} = \frac{\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1}}{\text{PDRB}_{t-1}} \times 100$$

Menurut Ladjin (2008) PDRB perkapita menunjukkan kemampuan masyarakat untuk membayar pengeluarannya termasuk membayar pajak. Semakin besar tingkat PDRB perkapita masyarakat mempunyai pengaruh positif dalam meningkatkan penerimaan pajak. PDRB perkapita merupakan salah satu indikator yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah dalam periode tertentu biasanya satu tahun, yang ditunjukkan dengan PDRB, baik atas harga berlaku maupun berdasarkan harga konstan. PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh berbagai unit ekonomi di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu, biasanya satu tahun. PDRB perkapita adalah PDRB dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun dengan satuan rupiah .

PDRB perkapita merupakan salah satu ukuran bagi kemakmuran suatu daerah, PDRB perkapita yang tinggi cenderung mendorong naiknya tingkat konsumsi

perkapita yang selanjutnya menimbulkan insentif bagi diubahnya struktur produksi (pada saat pendapatan meningkat, permintaan akan barang-barang manufaktur dan jasa pasti akan meningkat lebih cepat daripada permintaan akan produk-produk pertanian (Todaro, 2000). Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar (*ability to pay*) berbagai pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pada tingkat distribusi pendapatan tertentu yang tetap, semakin tinggi PDRB perkapita riil suatu daerah, semakin besar pula kemampuan masyarakat daerah tersebut untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan pemerintahannya. Maka dapat dikatakan bahwa semakin tinggi PDRB perkapita suatu daerah, semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut, sehingga kemampuan masyarakat untuk membayar pajak yang meningkat. Maka dapat dikatakan bahwa semakin tinggi PDRB perkapita suatu daerah, semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut.

#### **2.4 Hubungan Antara Pendapatan Asli Daerah dan Tenaga Kerja**

Tenaga kerja merupakan sumber daya manusia “poros” dari roda pembangunan dan perekonomian. Tenaga kerja yang memperoleh pekerjaan dan bekerja secara produktif akan memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Output dan tenaga kerja memiliki hubungan erat. Meningkatnya tenaga kerja berarti meningkatnya output per orang yang dipekerjakan biasa disebut produktivitas tenaga kerja. Hal ini menjadi kontribusi utama dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan Ekonomi merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa dengan tujuan meningkatkan pendapatan nasional riil juga

untuk meningkatkan produktivitas. Pembangunan ekonomi memiliki tujuan inti diantaranya peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kebutuhan hidup, peningkatan standar hidup (pendapatan, penyediaan lapangan kerja dan perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial (Todaro, 2006). Pembangunan ekonomi dapat memberikan kepada manusia kemampuan yang lebih besar untuk menguasai alam sekitarnya dan mempertinggi tingkat kebebasannya dalam mengadakan suatu tindakan tertentu termasuk didalamnya ialah pengembangan lapangan pekerjaan yang ada dimasing-masing daerah Kota maupun Kabupaten yang ada di Indonesia.

Perluasan penyerapan tenaga kerja diperlukan untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk usia muda yang masuk ke pasar tenaga kerja. Ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dan penciptaan lapangan kerja akan menyebabkan tingginya angka pengangguran. Kemudian, meningkatnya angka pengangguran akan mengakibatkan pemborosan sumber daya dan potensi angkatan kerja yang ada, meningkatnya beban masyarakat, merupakan sumber utama kemiskinan dan mendorong terjadinya peningkatan keresahan sosial, serta menghambat pembangunan ekonomi dalam jangka panjang (Depnakertrans, 2004).

Proses kegiatan ekonomi harus tumbuh dan berkembang lebih cepat dari pertambahan jumlah orang yang mencari pekerjaan. Keadaan ini sangat diperlukan untuk memperkecil tingkat pengangguran terbuka. Dengan adanya penyerapan tenaga kerja maka penduduk atau masyarakat yang sebelumnya tidak bekerja akan mendapatkan pekerjaan yang tentunya akan memberikan

penghasilan, dari penghasilan ini kemudahan akan dapat berubah menjadi konsumsi. Dengan demikian maka akan mengurangi kemiskinan, dapat mensejahterakan masyarakat

### **3. *Fiscal independence* (Kemandirian Fiskal)**

*Fiscal independence* merupakan salah satu aspek yang sangat penting dari otonomi daerah secara keseluruhan. Menurut Mardiasmo (1999) disebutkan bahwa manfaat adanya kemandirian fiskal adalah :

- a. Mendorong peningkatan partisipasi prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan serta akan mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumberdaya serta potensi yang tersedia di daerah.
- b. Memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah yang memiliki informasi lebih lengkap.

Dari hal tersebut diatas, *Fiscal independence* daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD seperti pajak dan retribusi daerah dan lain-lain dan pembangunan daerah bisa diwujudkan hanya apabila disertai *Fiscal independence* yang efektif. Ini berarti bahwa pemerintah daerah secara finansial harus bersifat independen terhadap pemerintah pusat dengan jalan sebanyak mungkin menggali sumber-sumber PAD seperti pajak, retribusi dan sebagainya (Radianto, 1997 dalam Thesaurianto, 2007).

Menurut Halim (2001), ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi (desentralisasi fiskal) adalah (1) kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan; (2) Ketergantungan kepadabantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh karena itu, PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonom yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonomi harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD khususnya pajak dan retribusi daerah menjadi bagian sumber keuangan terbesar (Koswara, 1999; Ladjin, 2008). Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ada beberapa faktor yang perlu diberdayakan diantaranya adalah investasi dan PDRB perkapita.

Berdasarkan penelitian terdahulu, menurut Pandji S. (2003) yang berjudul Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Fiskal Daerah (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara), *Fiscal independence* diukur melalui komponen PAD (Pendapatan Asli Daerah) terhadap TPD (Total Penerimaan Daerah). Sedangkan Kuncoro T. (2007) dalam Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah



Terhadap Kemandirian Daerah , menyebutkan bahwa *Fiscal independence* diukur melalui kompenen transfer pemerintah pusat terhadap PAD.

$$Fiscal\ independence = \frac{Transfer}{Total\ Pendapatan\ Daerah} \times 100$$

Selanjutnya penelitian yang dilakuka oleh Ervina A. , dkk (2013) variabel yang menjadi ukuran kemandirian fiskal yaitu pertumbuhan ekonomi dengan mempertimbangkan rasio PAD dan TPD.

$$Fiscal\ independence = \frac{Pendapatan\ Asli\ Daerah}{Total\ Pendapatan\ Daerah} \times 100$$

Dalam penelitian ini *Fiscal independence* diukur melalui rasio BHPBP terhadap TPD serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Suprajitno(2003), sebagai berikut:

$$Fiscal\ independence = \frac{Bagi\ Hail\ Pajak\ dan\ Bukan\ Pajak}{Total\ Pendapatan\ Daerah} \times 100$$

## B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Judul	Variabel/Metodelogi	Hasil
1.	Pudji Suprajitno (2003)	Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Fiskal Daerah (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara)	PAD, TPD dan PDRB / analisis regresi linier berganda	Ditinjau dari drajat desentralisasi fiskal dinilai masih kurang, atau dapat dinyatakan bahwa tingkat ketergantungan Kabupaten Banjarnegara terhadap pemerintah pusat cukup tinggi. Hal ini ditandai dengan kontribusi PAD maupun BHPBP terhadap TPD yang masih sangat rendah.
2.	Kuncoro Thesaurianto (2007)	Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kemandirian Daerah	PAD, Transfer pusat ke daerah, Jumlah kendaraan roda 4, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah / regresi linier dengan metode kuadrat terkecil biasa atau OLS ( <i>Ordinary Least Square</i> )	Transfer pemerintah pusat mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Provinsi Jawa Tengah.
3.	Nurjanna Ladjin (2008)	Analisis Kemandirian Fiskal di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Provinsi Sulawesi Tengah)	PAD, TPD, Investasi, dan PDRB Perkapita / metode kuadrat terkecil biasa atau OLS ( <i>Ordinary Least Square</i> ) Dan metode analisis deskriptif.	Hasil analisis OLS menunjukkan bahwa variabel investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Fiskal di Provinsi Sulawesi Tengah. Sedangkan pendapatan perkapita tidak berpengaruh terhadap kemandirian fiskal di Provinsi Sulawesi Tengah.

No.	Penulis	Judul	Variabel/Metodelogi	Hasil
4.	Lorenzo Boetti, Massimiliano Piacenza, dan Gilberto Turati (2010)	Decentralization and Local Governments Performance: How Does Fiscal Autonomy Affect Spending Efficiency	Belanja Pemerintah dan Pajak / Teknik Parametrik dan nonparametrik	Hasil penelitian menunjukkan bahwa daerah yang otonom memiliki kemandirian fiskal yang kurang efisien dan tidak menunjukkan hasil yang signifikan.
5.	Irdam Ahmad (2011)	Regional Fiscal Independence in East Java Province Regional Autonomy	DAU, DAK, dan Pajak / OLS	Dana Alokasi Umum berpengaruh secara signifikan terhadap pajak, sementara Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap pajak. Penelitian ini juga menemukan bahwa Dana Alokasi Umum mempengaruhi pertumbuhan Ekonomi.
6.	Ervina Anwar, Anderson Kumenaung, dan George Kawung (2013)	Analisis Kemandirian Fiskal Tahun 2010-2012 Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara	PAD, TPD, dan Pertumbuhan Ekonomi / Analisis regresi sederhana menggunakan SPSS	Pertumbuhan ekonomi Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Utara tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kemandirian Fiskal Daerah. Hal ini disebabkan masih rendahnya rasio kemandirian yang dimiliki oleh daerah Kab./Kota di Provinsi Sulawesi Utara.

No.	Penulis	Judul	Variabel/Metodelogi	Hasil
7.	Theresia Militina, Agus Indriatno Kurniawan, Rachmad Budi Suharto (2018)	Pengaruh Investasi Swasta dan Pemerintah setra Tenaga Kerja terhadap PAD dan Pertumbuhan ekonomi	Investasi, TK, PAD / Path analysis	Investasi Pemerintah berpengaruh langsung dan signifikan terhadap PAD. Sedangkan investasi swasta dan tenaga kerja berpengaruh langsung dan tidak signifikan terhadap PAD.
8.	Taryoko (2016)	Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2006-2013	PDRB, Jumlah Penduduk, Tenaga kerja, SDA/ <i>fixed effect model</i>	PDRB berpengaruh positif terhadap kemandirian daerah, Jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah, jumlah tenaga kerja tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah, SDA berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Seluruh variabel independen secara bersama-sama berpegaruh signifikan terhadap variabel dependen.

### C. Kerangka Pemikiran

*Fiscal independence* menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD seperti pajak dan retribusi daerah dan lain-lain dan pembangunan daerah bisa diwujudkan hanya apabila disertai *Fiscal independence* yang efektif. Ini berarti bahwa pemerintah daerah secara finansial harus bersifat independen terhadap pemerintah pusat dengan jalan sebanyak mungkin menggali sumber-sumber PAD seperti pajak, retribusi dan sebagainya (Radianto, 1997 dalam Thesaurianto, 2007).

Dalam proses menuju kemandirian Provinsi Lampung, terutama dari segi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dirasakan masih kurang. Hal ini tercermin dari peranan PAD terhadap TPD yang dirasakan masih rendah. Maka dari itu penulis ingin menganalisis faktor apa sajakah yang menjadi penyumbang terbesar terhadap PAD agar bisa lebih meningkatkan pembangunan perekonomian di provinsi Lampung. Penulis memilih investasi, PDRB perkapita dan jumlah tenaga kerja sebagai faktor-faktor yang diduga mempengaruhi *Fiscal independence*.

Investasi memainkan peranan penting dalam menggerakkan kehidupan ekonomi bangsa, karena pembentukan modal memperbesar kapasitas produksi, menaikkan pendapatan nasional maupun menciptakan lapangan kerja baru, dalam hal ini akan semakin memperluas kesempatan kerja. Dalam Ladjin (2008) investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap *fiscal independency* di Provinsi Sulawesi Tengah pada era otonomi daerah.

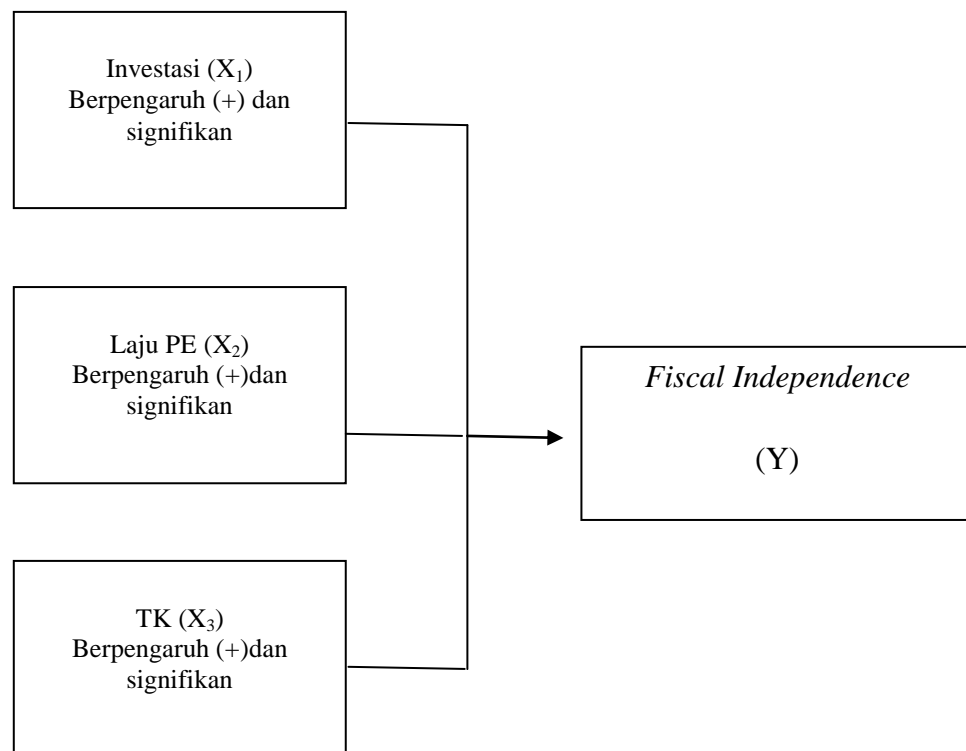
PDRB perkapita merupakan salah satu ukuran bagi kemakmuran suatu daerah. Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi PDRB perkapita riil suatu daerah dan semakin besar pula kemampuan masyarakat daerah tersebut untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan pemerintahannya. Dalam Ladjin (2008) PDRB tidak berpengaruh terhadap *fiscal independency* di Provinsi Sulawesi Tengah pada era otonomi daerah.

Tenaga kerja berperan sebagai faktor input yang potensial yang dapat digunakan sebagai faktor produksi untuk meningkatkan output suatu rumah tangga perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Steven dan McGowen meyakini

bahwa Jumlah Tenaga Kerja berpengaruh terhadap kemandirian keuangan pemerintah daerah. Semakin besar tingkat Jumlah Tenaga Kerja yang dimiliki oleh suatu daerah, maka akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah daerah itu sendiri. Pendapatan pemerintah daerah yang tinggi inilah yang akan meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah..

Penelitian ini akan menganalisa bagaimana pengaruh variabel-variabel terhadap derajat atau tingkat *Fiscal Independence* Sejak era otonomi daerah di Provinsi Lampung. Dimana variabel tersebut yaitu investasi, laju PE dan tenaga kerja dengan periode 2001-2015 (era otonomi daerah).

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini, secara skematis dapat dilihat pada Gambar 5. di bawah ini.



Gambar 5. Kerangka Pemikiran

#### **D. Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan kerangka teoritis dalam penelitian ini, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H<sub>1</sub> : Diduga investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat *Fiscal Independence* Sejak era otonomi daerah di Provinsi Lampung.

H<sub>2</sub> : Diduga laju PE berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat *Fiscal Independence* Sejak era otonomi daerah di Provinsi Lampung.

H<sub>3</sub> : Diduga tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat *Fiscal Independence* Sejak era otonomi daerah di Provinsi Lampung.

H<sub>4</sub> : Investasi, laju PE dan tenaga kerja secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat *Fiscal Independence* Sejak era otonomi daerah di Provinsi Lampung.

### III. METODELOGI PENELITIAN

#### A. Jenis, Periode dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder (*time series*) selama periode tahun 2001 s/d 2015 dengan data interpolasi. Penggunaan data sekunder dengan periode waktu studi yang relatif panjang yaitu 15 (lima belas) menjadi permasalahan ketidakakuratan pengumpulan data dan keterbatasan data dari berbagai institusi. Data *time series* pada penelitian ini kemudian dilakukan interpolasi menjadi data kuartal agar memenuhi syarat ketika melakukan regresi.

Adapun data yang diperoleh berupa :

- a. Data realisasi penerimaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) atau total penerimaan daerah (TPD) Provinsi Lampung, di mana di dalamnya terdapat data :
  1. Bagian sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu.
  2. PAD yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah dan penerimaan lain-lain.
  3. Bagian pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah atau instansi yang lebih tinggi yang terdiri dari bagi hasil pajak dan bukan pajak (BHPBP), sumbangan dan bantuan dan penerimaan lainnya berupa DAU dan DAK.



- b. Data PDRB Provinsi Lampung, dimana didalamnya terdapat data pendapatan dan besaran/nilai sektor ekonomi yang difokuskan pada sembilan sektor/lapangan usaha.
- c. Data Investasi di Provinsi Lampung, dimana didalamnya terdapat data investasi yang ditunjukkan oleh pembentukan modal tetap bruto.
- d. Data jumlah tenaga kerja Provinsi Lampung.

Adapun sumber data berupa buku-buku laporan tahunan beberapa terbitan seperti Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, Lampung Dalam Angka, PDRB Lampung dan jurnal-jurnal beberapa terbitan yang dapat diperoleh diberbagai instansi yaitu :

1. BPS Provinsi Lampung
2. Departemen Keuangan RI
3. Instansi lain yang terkait dengan penelitian ini.

## **B. Definisi Operasional Variabel**

FI : Derajat *Fiscal independence* yang diproksi dari rasio antara PAD dengan Total Penerimaan APBD Provinsi Lampung pada tahun yang sama, dinyatakan dalam persen. Yang diperoleh dari Departemen Keuangan RI, dari berbagai edisi.

Investasi : Kinerja investasi yang diproksi dari PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) di Provinsi Lampung menurut harga berlaku, dinyatakan dalam persen. Data diperoleh melalui BPS Provinsi Lampung.

Laju PE : Total nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi atau lapangan usaha dalam perekonomian di Provinsi Lampung dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun) dikurangi dengan tahun sebelumnya kemudian dibagi dengan tahun sebelumnya, dinyatakan dalam persen. Data diperoleh melalui BPS Provinsi Lampung.

Tenaga Kerja : pertumbuhan jumlah tenaga kerja Provinsi Lampung sejak era otonomi daerah yaitu tahun 2001-2015, dinyatakan dalam juta jiwa, kemudian diubah menjadi persentasi. Data diperoleh melalui BPS Provinsi Lampung.

### C. Model Penelitian

Model ekonomi yang digunakan untuk mengestimasi fungsi *Fiscal Independence* dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$FI = f (INV, LajuPE, TK) \quad (1)$$

Model ekonomi dari persamaan (1) tersebut diturunkan menjadi model ekonometrik (Gujarati, 2003) :

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_{1t} + \beta_2 X_{2t} - \beta_3 X_{3t} + \mu_t \quad (2)$$

Dimana :

Y : tingkat *Fiscal independence*  
 $\alpha$  : Konstanta  
 $X_1$  : Investasi  
 $X_2$  : Laju PE  
 $X_3$  : Tenaga Kerja  
 $\mu$  : *error term*  
t : unit time series

## D. Metode Analisis

### 1. Analisis Deskriptif

Teknik analisis yang digunakan untuk menjawab tujuan kedua dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, yang dilakukan dengan menggunakan ukuran yang disebut Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah. Perhitungannya menggunakan rasio BHPBP terhadap TPD yang disajikan dalam bentuk tabel. Hal ini bermanfaat untuk menggambarkan seberapa tingkat *fiscal independence* daerah provinsi Lampung terhadap pemerintah pusat selama kurun waktu penelitian.

Adapun untuk mengetahui seberapa besar tingkat ketergantungan fiskal digunakan kriteria derajat desentralisasi daerah yang dibuat oleh Badan Litbang Depdagri dan Fisipol UGM (1991) sebagai berikut :

1. 0,00% s/d 10% : sangat kurang
2. 10,1 s/d 20% : kurang
3. 20,1% s/d 30% : cukup
4. 30,1% s/d 40% : baik
5. 40,1% s/d 50% : sangat baik
6. > 50% : memuaskan

### 2 . Uji Stasionaritas (Unit Root Test)

Stasioneritas merupakan salah satu prasyarat penting dalam model ekonometrika untuk data runtut waktu (*time series*). Suatu data dikatakan stasioner jika

memenuhi tiga kriteria yaitu jika rata-rata dan variannya konstan sepanjang waktu dan kovarian antara dua data runtut waktu hanya tergantung dari kelambanan antara dua periode waktu tersebut. Apabila data yang digunakan dalam model ada yang tidak stasioner, maka akan menyebabkan hasil regresi meragukan atau disebut regresi lancung (*spurious regression*). Regresi lancung adalah situasi dimana hasil regresi menunjukkan koefisien regresi yang signifikan secara statistik dan nilai koefisien determinasi yang tinggi namun hubungan antara variabel di dalam model tidak saling berhubungan (Widarjono, 2013).

Salah satu konsep formal yang dipakai untuk mengetahui stasioneritas data adalah melalui uji akar unit (*unit root test*). Uji ini merupakan pengujian yang populer, dikembangkan oleh David Dickey dan Wayne Fuller dengan sebutan *Augmented Dickey-Fuller (ADF) Test*. Jika suatu data *time series* tidak stasioner pada orde nol,  $I(0)$ , maka stasioneritas data tersebut bisa dicari melalui order berikutnya sehingga diperoleh tingkat stasioneritas pada order ke- $n$  (*first difference*) atau  $I(1)$ , atau *second difference* atau  $I(2)$ , dan seterusnya. Hipotesis untuk pengujian ini adalah:

$H_0: \delta = 0$ , terdapat *unit root*, tidak stasioner

$H_a: \delta \neq 0$ , tidak terdapat *unit root*, stasioner

Seluruh data yang digunakan dalam regresi dilakukan uji akar unit dengan berpatokan pada nilai batas kritis ADF. Hasil uji akar unit dengan membandingkan hasil t-hitung dengan nilai kritis MacKinnon. Jika nilai t-hitung

absolut lebih besar dari nilai kritis MacKinnon absolut, maka  $H_0$  ditolak artinya data *time series* stasioner. Sebaliknya jika nilai t-hitung absolut lebih kecil dari nilai kritis MacKinnon absolut, maka  $H_0$  diterima artinya data *time series* tidak stasioner. Dalam kasus jika nilai t-hitung negatif, maka dapat dikatakan jika nilai t-hitung lebih kecil dari nilai kritis MacKinnon, maka  $H_0$  ditolak artinya data *time series* stasioner, jika sebaliknya  $H_0$  diterima artinya data *time series* tidak stasioner (Gujarati, 2008). Jika hasil uji menolak hipotesis adanya *unit root* untuk semua variabel, berarti semua adalah stasionaritas atau dengan kata lain, variabel-variabel terkointegrasi pada I (0), sehingga estimasi akan dilakukan dengan menggunakan regresi linier biasa (OLS). Jika hasil uji *unit root* terhadap level dari variabel-variabel menerima hipotesis adanya *unit root*, berarti semua data adalah tidak stasioner atau semua data terintegrasi pada orde I (1). Jika semua variabel adalah tidak stasioner, estimasi terhadap model dapat dilakukan dengan teknik kointegrasi.

### **3. Uji Kointegrasi**

Konsep kointegrasi pada dasarnya adalah untuk mengetahui kemungkinan adanya hubungan keseimbangan jangka panjang pada variabel-variabel yang diobservasi. Dalam konsep kointegrasi, dua atau lebih variabel runtun waktu tidak stasioner akan terkointegrasi bila kombinasinya juga linier sejalan dengan berjalannya waktu, meskipun bisa terjadi masing-masing variabelnya bersifat tidak stasioner.

Bila variabel runtun waktu tersebut terkointegrasi maka terdapat hubungan yang stabil dalam jangka panjang. Uji kointegrasi adalah uji ada tidaknya hubungan jangka panjang antara variabel bebas dan variabel terikat. Uji ini merupakan

kelanjutan dari uji *stationary*. Tujuan utama uji kointegrasi ini adalah untuk mengetahui apakah *residual* terkointegrasi *stationary* atau tidak. Apabila variabel terkointegrasi maka terdapat hubungan yang stabil dalam jangka panjang. Sebaliknya jika tidak terdapat kointegrasi antar variabel maka implikasi tidak adanya keterkaitan hubungan dalam jangka panjang. Istilah kointegrasi dikenal juga dengan istilah *error*, karena deviasi terhadap keseimbangan jangka panjang dikoreksi secara bertahap melalui series parsial penyesuaian jangka pendek. Ada beberapa macam uji kointegrasi, antara lain:

#### 1) Uji Kointegrasi Engel-Granger (EG)

Penggunaan kointegrasi EG didasarkan atas uji ADF (C,n), ADF (T,4) dan statistik regresi kointegrasi CRDW (*Cointegration Regression Durbin Watson*). Dasar pengujian ADF (C,n), ADF (T,4) adalah *statistic Dickey-Fuller*, sedangkan uji CDRW didasarkan atas nilai *Durbin Watson Ratio*, dan keputusan penerimaan atau penolakannya didasarkan atas angka statistik CDRW.

Hipotesis:

$H_0 : \beta = 0$ , Variabel – variabel tidak ada kointegrasi

$H_a : \beta \neq 0$ , Variabel – variabel ada kointegrasi

Kriteria untuk pengujian ini adalah:

$H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, jika nilai t kritis  $>$  Augmented Dickey Fuller (ADF).

$H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, jika nilai t kritis  $<$  Augmented Dickey Fuller (ADF).

#### 4. Ordinary Least Square (OLS)

Jika data sudah stasioner pada tingkat level, maka metode kuadrat terkecil (*Ordinary Least Square = OLS*) dapat digunakan untuk mengestimasi parameter model regresi linier berganda. Regresi adalah studi bagaimana pengaruh satu

variabel dependen dipengaruhi oleh satu atau lebih dari variabel independen dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi nilai rata-rata variabel dependen didasarkan pada nilai variabel independen yang diketahui. Model regresi berganda adalah model regresi yang terdiri dari lebih dari satu variabel independen.

Metode kuadrat terkecil (*Ordinary Least Square = OLS*) adalah metode yang dapat digunakan mendapatkan garis regresi yang baik yang terjadi jika nilai prediksinya sedekat mungkin dengan data aktualnya atau nilai  $\beta_0$  dan  $\beta_1$  yang menyebabkan residual sekecil mungkin (Widarjono, 2013). Model ekonometrika dengan metode kuadrat terkecil (*Ordinary Least Square = OLS*) sebagai berikut:

$$FI_t = \beta_0 + \beta_1 RINV_t + \beta_2 RLJUPE_t + \beta_3 RTKP_t + e_t$$

Dengan uraian sebagai berikut:

$\beta_0$  = Konstanta Regresi

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$  = Koefisien Regresi

$FI_t$  = Tingkat fiscal independence

$RINV_t$  = Rasio Investasi

$RLJUPE_t$  = Rasio Laju Pertumbuhan Ekonomi

$RTK_t$  = Rasio Tenaga Kerja

$e_t$  = *error term*

## 5. Error Correction Model (ECM)

Jika data tidak stasioner pada tingkat level, tetapi stasioner pada tingkat diferensi dan kedua variabel terkointegrasi atau dengan kata lain mempunyai hubungan atau keseimbangan jangka panjang. Dalam jangka pendek mungkin saja ada ketidakseimbangan. Artinya, bahwa apa yang diinginkan oleh pelaku ekonomi belum tentu sama dengan apa yang terjadi sebenarnya. Adanya perbedaan apa yang diinginkan pelaku ekonomi dan apa yang terjadi maka diperlukan adanya penyesuaian. Model yang memasukkan penyesuaian untuk melakukan koreksi bagi ketidakseimbangan disebut sebagai *Error Correction Model/ECM* (Widarjono, 2013). Analisis ECM digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Model *Error Correction Model* (ECM) mempunyai ciri khas dengan dimasukkannya unsur *Error Correction Term* (ECT) dalam model. Apabila koefisien ECT signifikan secara statistik, maka spesifikasi model yang digunakan dalam penelitian adalah valid. Model ECM juga memasukkan penyesuaian (D) untuk melakukan koreksi ketidakseimbangan jangka pendek menuju pada keseimbangan jangka panjang.

Model *Error Correction Model* (ECM) yang diasumsikan dalam penelitian ini yaitu:

$$DFI_t = \beta_0 + \beta_1 DINV_t + \beta_2 DLAJUPE_t - \beta_3 DTK_t + ECT$$

Dengan uraian sebagai berikut:

$\alpha_0$  = Konstanta Regresi Jangka Pendek

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$  = Koefisien Regresi Jangka Pendek



$\alpha_6$  = Koefisien Koreksi Ketidakseimbangan

$RINV_t$  = Rasio Investasi

$RLAJUPE_t$  = Rasio Laju PE

$RTK_t$  = Rasio Tenaga Kerja

ECT = *Error Correction Term*

## 6. Pengujian Keberartian Setiap Variabel (Uji-t)

Uji-t dikenal dengan uji parsial, yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya. Uji-t ini pada tingkat kepercayaan 95 persen dengan derajat kebebasan  $n-k-1$  ( $n$  = jumlah observasi,  $k$  = jumlah variabel bebas).

Hipotesis yang digunakan:

### 1. Investasi

$H_0: \beta_1 = 0$ , investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat fiscal independence.

$H_a: \beta_1 > 0$ , investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat fiscal independence.

### 2. Laju PE

$H_0: \beta_2 = 0$ , maka variabel Laju PE tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat fiscal independence.

$H_a: \beta_2 > 0$ , maka variabel Laju PE berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat fiscal independence.

### 3. TK

$H_0: \beta_3 = 0$ , maka variabel TK tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat fiscal independence.

$H_a: \beta_3 > 0$ , maka variabel TK berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat fiscal independence.

Kriteria pengambilan keputusan:

- a. Ketika nilai t-hitung  $>$  nilai t-tabel maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya variable bebas berpengaruh terhadap variable terikat.
- b. Ketika nilai t-hitung  $<$  nilai t-tabel maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, artinya variable bebas tidak berpengaruh terhadap variable terikat.

## 7. Pengujian Keberartian Menyeluruh (Uji-F)

Uji-F adalah uji untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Uji-F ini pada tingkat kepercayaan 95 persen dan derajat kebebasan  $df_1 = k$  dan  $df_2 = n-k-1$  ( $n =$  jumlah observasi,  $k =$  jumlah variabel bebas).

Hipotesis yang digunakan:

$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_k = 0$  (semua variabel bebas secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel terikat)

$H_a$ : Jika minimal ada 1  $\beta_k$  yang  $\neq 0$  (semua variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat)

Apabila:

F-hitung  $\leq$  F-tabel: maka  $H_0$  diterima

F-hitung  $>$  F-tabel: maka  $H_0$  ditolak atau menerima  $H_a$

Jika  $H_0$  diterima, berarti variabel bebas yang diuji secara bersama-sama tidak berpengaruh nyata terhadap variabel terikat, dan sebaliknya.

## V. SIMPULAN DAN SARAN

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Derajat perkembangan *fiscal independence* di provinsi Lampung sejak era otonomi daerah tidak selalu mengalami peningkatan.
2. Variabel investasi dalam jangka pendek dan jangka panjang berpengaruh positif dan signifikan terhadap *fiscal independence* di provinsi Lampung tahun 2001-2015 . Hasil ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan.
3. Variabel laju PE dalam jangka pendek berpengaruh positif dan signifikan tetapi dalam jangka panjang tidak berpengaruh terhadap *fiscal independence* di provinsi Lampung tahun 2001-2015 . Hasil ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan.
4. Variabel jumlah tenaga kerja dalam jangka pendek tidak berpengaruh dan dalam jangka panjang berpengaruh positif dan signifikan terhadap *fiscal independence* di provinsi Lampung tahun 2001-2015 . Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis yang diajukan.
5. Secara bersama-sama variabel investasi, laju PE dan tenaga kerja mempengaruhi *fiscal independence* di provinsi Lampung tahun 2001-2015 . Hasil ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan pada penelitian ini maka terdapat beberapa saran dalam upaya meningkatkan *fiscal independence* di provinsi Lampung sebagai berikut:

1. Mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah melalui investasi, khususnya Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) melalui iklim yang kondusif bagi para investor sehingga aktivitas ekonomi daerah meningkat, kesempatan kerja bertambah, pendapatan penduduk naik, daya beli masyarakat meningkat, dan penerimaan pemerintahpun semakin besar agar *fiscal independence* di provinsi Lampung dapat terus mengalami peningkatan namun tetap menjaga iklim investasi di Lampung.
2. Dalam upaya peningkatan kemandirian daerah pemerintah daerah juga dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya memberikan proporsi belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan pada sektor – sektor yang produktif di daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, A. 2012. *"Filosofi Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal"*. DTSD Pusdiklat KNPB-BPPK.
- Adhidarma, G., dan Purbasari, D. 2012. *"Hubungan antara Investasi dengan GDP"*. Macroeconomic Dashboard: Universitas Gajah Mada.
- Asmuruf, M., Rumat, V., dan Kawung, G., 2015. *"Pengaruh Pendapatan dan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Sorong"*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol. 15 No. 05.
- Ahmad, I. 2011. *"Regional Fiscal Independence in East Java Province Post Regional Autonomy"*. Economic Journal of Emerging Markets. Vol. 3(2) 189-198.
- Anwar, E. 2013. *"Analisis Kemandirian Fiskal Tahun 2010-2012 daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara"*. Jurnal Berkala Efisiensi, Universitas Sam Ratulangi.
- Astuti, Titi Yuli., dan Sunarto. 2015. *"Pengaruh PAD dan DAU terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2008-2013."* Accounting journal, Vol.3 No.1 Juni 2015.
- Aziz, A., dan Wulandari, R. 2013. *"Analisis Pengaruh Equalization Grant, Sumber Kemandirian Fiskal, Sumber Pembiayaan Defisit, dan Faktor Penyerap Fasilitas Publik terhadap Belanja Modal Daerah"*. Jurnal Akuntansi ABFI Institute PERBANAS.
- Badrudin, Rudi. 2011. *"Ekonomika Otonomi Daerah"*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Badan Pusat Statistik, 2001 – 2015. *"Lampung Dalam Angka"*. Provinsi Lampung.
- Boediono. 1999. *"Mengenal Beberapa Metode Kuantitatif dalam Ilmu Ekonomi"*. BPFE.

- Boetti, L., Piacenza, M., dan Turati, G. 2010. "*Decentralization Government's Performance: How Does Fiscal Autonomy Affect Spending Efficiency*". Departement of Economics and Public Finance "G. Prato" Working Paper Series.
- Departemen Keuangan RI, 2015. "*Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*". Jakarta.
- Eka, A. 2011. "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang". [Skripsi] Semarang: Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. 2003. "*Essentials of Econometric*". McGraw Hill International Editions.
- Jhomsom, P., dan Philips, D. 2012. "*Scottish Independence: the Fiscal Context*". Institute for Fiscal Studies. Briefing Note BN135.
- Kristiano, N. 2015. "*Otonomi Daerah*". Universitas Negeri Semarang.
- Kopits, G. 2016. "*The Case for an Independent Fiscal Institution in Japan*". IMF Working Paper Vol. 16 No. 156.
- Kumorotomo, W. 2008. "*Desentralisasi Fiskal: Politik dan Perubahan Kebijakan 1974-2004*". Prenada Media.
- Kuncoro, M. 2004. "*Otonomi & Pembangunan Daerah*". Universitas Gajah Mada.
- Ladjin, Nujanna. 2008. "Analisis Kemandirian Fiskal di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Provinsi Sulawesi Tengah)". [Tesis] Semarang: Universitas Diponegoro.
- Mardiasmo. 1999. "*Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berorientasi Pada Kepentingan Publik*". PAU Studi Ekonomi UGM.
- Maryeta, Ruth Karlina., dan Hutasoit. 2017. "*Pengaruh PAD, DBH, DAU dan DAK Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat*". International Repository (USU-IR).
- Merizka, Reza. 2013. "*Pengaruh PAD, DBH, DAU dan DAK Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat (Tahun 2006-2011)*". Artikel Ilmiah, UNP.
- Mita, A. 2012. "Pengaruh Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah". [Skripsi] Tasikmalaya: Universitas Siliwangi

- Ratnik, A. 2015. “*Fiscal Independence of the Health Insurance System*”. Ministry of Finance of the Republic of Estonia.
- Sukirno, S. 2000. “*Makroekonomi Modern – Perkembangan Pemikiran dari Klasik Hingga Keynesian Baru*”. PT. Raja Grafindo Persada.
- Suprajitno, Pudji. 2003. “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Fiskal Daerah (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara)”. [Tesis] Semarang: Universitas Diponegoro.
- Taryoko. 2016. “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah di DIY periode 2006-2015.” [Skripsi] Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Thesaurianto, Kuncoro. 2007. “Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kemandirian Daerah”. [Tesis] Semarang: Universitas Diponegoro.
- Walalangi, Stasya., Dkk. 2017. “*The Influence of Local Revenue to Employment in Manado.*” Jurnal Berkala Ilmian Efisiensi. Vol. 17 no. 01.
- William, V. 1966. “*New Light on Size Question*”. Journal cit – Reseach Bulletin, Vol. 6(2).
- Yusdianto. 2015. “*Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah Menurut UU no. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*”. Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 3.

URL :

<http://respository.usu.ac.id/handle/123456789/68049>

<https://doi.org/10.24964/ja.v3i1.41>

<https://lampung.bps.go.id>

[www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)